

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan harapan setiap negara. Pertumbuhan merupakan indikator dari pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat diukur dari total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu negara dalam bentuk persentase (Todaro, 2006;118). Namun untuk mencapai kondisi pembangunan yang baik, tidak cukup dengan hanya memperhatikan pertumbuhan saja, karena secara umum tujuan dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi.

Tantangan dalam pembangunan di setiap negara baik itu negara maju maupun berkembang pada umumnya adalah tidak meratanya distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara berkembang juga menghadapi masalah tidak meratanya pendapatan dimana terdapat golongan-golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan golongan masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam proses pembangunan, ketimpangan akan selalu ada, khususnya pada saat tahap awal pembangunan, bahkan negara maju pun mengalami ketimpangan (Kuznets, 1955), namun ketimpangan tersebut perlu diantisipasi agar tidak semakin melebar dan mengganggu proses pembangunan.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini Rasio. Gini Rasio Indonesia pada tahun 2016 berada pada 0,397 dan empat dari enam

provinsi di pulau Jawa mempunyai indeks gini yang melebihi ketimpangan nasional, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan masing-masing sebesar 0,41, 0,41, 0,42, dan 0,4.

Selain permasalahan indeks gini yang tinggi di Pulau Jawa, juga terdapat ketimpangan yang sangat besar pada PDRB per kapita antar provinsisi. Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan yang mempunyai sumbangan terbesar bagi Indonesia yaitu sebesar 58,14% terhadap PDB Nasional pada tahun 2016 (tabel 1.1). Dengan demikian, ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan agar sumbangan terhadap PDB nasional lebih maksimal.

Tabel 1.1. PDRB per Kapita ADHK 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	PDRB per Kapita ADHK 2010 (ribu rupiah)	
	2015	2016
DKI Jakarta	142.892,2	149.779,4
Jawa Barat	25.842,3	26.922,0
Jawa Tengah	23.887,4	24.967,8
DI Yogyakarta	22.688,4	23.566,2
Jawa Timur	34.272,3	35.962,4
Banten	30.799,6	31.761,9

Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat, bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta dari tahun 2015 dan 2016 PDRB per kapita tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 2016 PDRB per Kapita DKI Jakarta sebesar 149 juta rupiah, angka yang sangat tinggi dan mencolok dibanding provinsi lainya. Dan ketimpangan tersebut sangat kentara dibandingkan provinsi di DI Yogyakarta dimana nilai PDRB per Kapita pada 2016 hanya 23 juta rupiah. Hal ini dapat

membuktikan dengan jelas bahwa pulau Jawa sebagai pusat perekonomian mengalami permasalahan tidak meratanya pencapaian kesejahteraan tiap provinsi.

Ketimpangan pendapatan juga berhubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan bertambahnya penyerapan angkatan kerja menimbulkan banyaknya pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di tiap provinsi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan. Hal ini berdampak tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah. Tingkat pengangguran terbuka nasional pada Agustus 2016 adalah sebesar 5,61%, sedangkan tiga dari enam provinsi di Pulau Jawa mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang melebihi nasional yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dengan nilai masing-masing 6,12%, 8,89%, 8,92%. (BPS, 2016).

Di era otonomi daerah saat ini salah satu usaha pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dengan merancang kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemerintah daerah melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya kecuali urusan yang diatur oleh Undang-Undang yang memang menjadi urusan pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003). Keberhasilan desentralisasi fiskal dari suatu daerah dapat diukur dengan besarnya nilai derajat desentralisasi fiskalnya. Derajat desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan kemandirian daerah. TIM fisipol UGM dalam Elsjamina (2016) mengkategorikan derajat desentralisasi fiskal lebih dari 50% berarti kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat baik.

Tingkat desentralisasi fiskal di Pulau Jawa dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan sangat baik, dimana lima dari enam provinsi mempunyai nilai desentralisasi diatas 50% yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan masing-masing 68,58%, 61,54%, 58,79%, 63,37%,63,11, sedangkan untuk provinsi DI Yogyakarta berada dalam kategori baik dengan nilai42,93%

Investasi swasta dalam hal ini penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan, dimana permintaan yang tinggi di wilayah maju dapat mengakibatkan kelangkaan modal bagi daerah berkembang. Kelangkaan modal di suatu daerah akan mengakibatkan pembangunan daerah lebih lambat dibanding dengan sumber daya modal yang besar. kelangkaan modal akan mengakibatkan kurangnya kegiatan ekonomi yang produktif di suatu daerah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pendapatan per kapita penduduk. Tingkat investasi

swasta di pulau Jawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun masih belum merata di tiap provinsi. Pada tahun 2016 investasi paling besar berada di provinsi Jawa Barat sebesar Rp.103,8 triliun, kemudian diikuti provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dengan nilai masing-masing sebesar Rp.72,4 Triliun, Rp.57,8 Triliun, Rp.51,5 Triliun, Rp. 37,9 Triliun, 1,2 Triliun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, bahwa Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian mengalami permasalahan tidak meratanya pencapaian kesejahteraan masyarakat, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan masing-masing provinsi di Pulau Jawa serta faktor apa saja yang mempengaruhinya, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007 -2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi penelitian pada PDRB per Kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT) derajat desentralisasi fiskal, serta investasi swasta sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Jawa?
- b. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan masing-masing provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

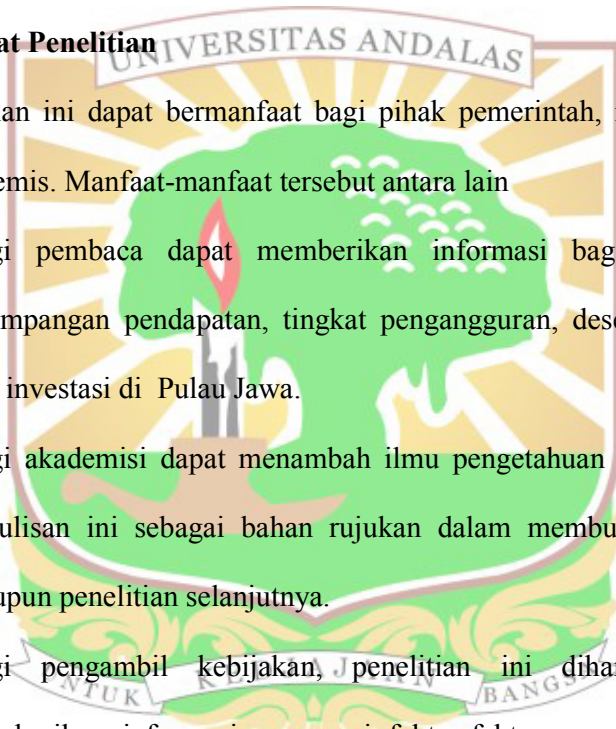
Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis kondisi ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Jawa
- b. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal dan investasi swasta terhadap ketimpangan pendapatan masing-masing provinsi di Pulau Jawa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademis. Manfaat-manfaat tersebut antara lain

- a. Bagi pembaca dapat memberikan informasi bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal dan investasi di Pulau Jawa.
- b. Bagi akademisi dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulisan ini sebagai bahan rujukan dalam membuat karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat.



1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini terfokus pada bagaimana pengaruh beberapa variabel terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas, yang menjadi variabel terikat disini adalah Ketimpangan pendapatan diukur dengan indeks gini, dan variabel bebasnya terdiri dari PDRB per Kapita, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, dan investasi swasta masing-masing provinsi Pulau Jawa. Maka ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang disebutkan diatas, variabel lain diluar variabel tersebut tidak akan dibahas pada penelitian ini.

